

Template Komitmen OGP

Negara	Indonesia
Nomor dan Nama Komitmen	Akuntabilitas Sosial Dalam Musyawarah Desa
Deskripsi Singkat Komitmen	<p>Akuntabilitas sosial merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam mengupayakan pemerintahan yang akuntabel dan lebih berkualitas dalam penyediaan layanan publik serta pemenuhan hak-hak masyarakat. Berbagai bentuk akuntabilitas sosial seperti kartu penilaian layanan, jurnalisme warga, monitoring kolaborasi, pos pengaduan dan lain-lain tentu menjadi ruang bagi warga untuk menuntut kepada pemerintah/penyedia layanan untuk meningkatkan layanan dan tata kelola yang baik agar hak-hak warga atas layanan itu terpenuhi.</p> <p>Hasil evaluasi pendekatan akuntabilitas sosial, yang diimplementasikan Wahana Visi Indonesia pada sejumlah desa menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas sosial dapat meningkatkan layanan maupun tata kelola melalui penguatan sistem pemerintahan dan relasi yang makin baik antara pemerintah dan masyarakat atau warga. Kolaborasi masyarakat bersama aparat pemerintah dan penyedia layanan diawali dengan proses refleksi baik dari sisi warga maupun pemerintah /penyedia layanan sebagai pemangku kepentingan negara yang selanjutnya dibawah ke forum musyawarah bersama untuk menetapkan rencana aksi dan implementasinya juga memperkuat proses perencanaan dan penganggaran untuk layanan publik..</p> <p>Suksesnya proses akuntabilitas sosial tentu tidak hanya diukur dari tingkat keterlibatan atau partisipasi maupun akses warga atau masyarakat, tetapi juga diukur melalui komitmen pemerintah maupun penyedia layanan, dalam memenuhi harapan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan dan layanan sesuai standar termasuk melalui kanal-kanal partisipatif dan keterbukaan yang seharusnya disediakan.</p> <p>Salah satu mekanisme partisipatif khususnya di desa yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah musyawarah desa (musdes) sebagai forum tertinggi di desa . Musdes adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Musdes menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan terutama penyusunan RKP Desa setiap tahun dimana tahapan awal penyusunannya diawali dengan Musdes.</p> <p>Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 4 menegaskan bahwa Musdes berasaskan: musyawarah mufakat; keadilan; keterbukaan; transparan; akuntabel; partisipatif; demokratis; dan kesetaraan. Prinsip kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis melalui Musdes juga ditegaskan dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun beberapa kajian menemukan dalam pelaksanaannya proses Musdes bahkan Musrenbang disinyalir hanya formalitas dan cenderung didominasi elit (elite capture) dengan semangat partisipasi dan pelibatan masyarakat yang masih minim. Asas musdes yang diatur atau ditetapkan melalui beberapa kebijakan/peraturan diatas sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial yakni partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menekankan semangat kolaborasi antara pemerintah/penyedia layanan bersama masyarakat. Musdes sebagai forum</p>

	demokratis di desa harus menjadi mekanisme awal atau penggerak akuntabilitas di desa. Oleh karena itu, pendekatan dan prinsip akuntabilitas sosial perlu diupayakan menjadi mekanisme utama dalam Musdes agar proses musdes berjalan sesuai asas maupun tujuannya sebagai forum demokratis dan inklusif di desa dan tercapainya tujuan desa.		
Pengusul Komitmen	Wahana Visi Indonesia		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Desa PDTT - Kementerian Dalam Negeri 	Wahana Visi Indonesia	
Jangka Waktu	2 (dua) Tahun		

Identifikasi Masalah
<p>1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas dan tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat terutama kelompok rentan dan terpinggir termasuk anak, perempuan dan disabilitas dalam seluruh proses pembangunan khususnya perencanaan dan penganggaran serta implementasi dan pemantauan. - Forum partisipatif dan demokratis di desa seperti musyawarah desa maupun musyawarah dusun benar-benar dijalankan dan diperkuat dengan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. - Mengintegrasikan akuntabilitas sosial dan mekanisme yang sudah ada di desa, sehingga menjadi bagian dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pengawasannya.
<p>2. Apa penyebab permasalahan tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada mekanisme atau pendekatan yang digunakan secara spesifik dalam proses musdes yang memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas sosial - Terbatasnya kapasitas masyarakat maupun pemangku kepentingan negara di level desa dalam mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial dalam musdes - Dominasi elit dan kelompok tertentu dalam proses musdes

Deskripsi Komitmen
<p>1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Kemendesa sudah mengeluarkan panduan akuntabilitas sosial di desa dengan sejumlah model atau pendekatan akuntabilitas sosial yang diterapkan di desa. - Wahana Visi Indonesia telah mengembangkan manual pendekatan akuntabilitas sosial Suara – Aksi Warga dan telah melakukan pembelajaran, sehingga dapat menjadi bagian dari proses replikasi berbasis bukti. - Wahana Visi Indonesia mengimplementasikan akuntabilitas sosial dalam program di wilayah dampingan, termasuk di 71 desa. Walau demikian proses ini masih berjalan terpisah dari mekanisme desa yang ada.
<p>2. Solusi apa yang diusulkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model atau pendekatan akuntabilitas sosial terutama prinsip-prinsip akuntabilitas sosial perlu diintegrasikan dalam forum-forum demokratis dan partisipatif di desa terutama untuk perencanaan dan penanggaran serta pelaksanaan pembangunannya dan pemantauan, yaitu proses musyawarah desa (musdes) ataupun bentuk mekanisme lain yg sudah ada dalam perencanaan pembangunan.
<p>3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas musdes terutama pelibatan masyarakat dan kolaborasi dalam perencanaan, implementasi maupun pemantauan pembangunan di desa terutama pelibatan kelompok rentan dan terpinggir seperti anak, perempuan dan disabilitas. - Proses musdes dilakukan sejalan atau menerapkan prinsip maupun pendekatan akuntabilitas sosial seperti kolaborasi monitoring atau kartu penilaian layanan maupun model partisipatif lainnya - Komitmen ini meningkatkan musdes yang berkontribusi signifikan untuk peningkatan layanan publik termasuk layanan dasar dan tata kelola pembangunan di desa

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Implementasi akuntabilitas sosial dalam musdes akan memperkuat relasi dan kolaborasi antara masyarakat dan aparat desa maupun supra desa. Relasi yang makin baik antara masyarakat dan pemangku kepentingan negara ini akan memperbesar ruang keterbukaan antara keduanya.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Keterlibatan yang bermakna dan keterbukaan yang tercipta dalam proses musdes melalui pendekatan akuntabilitas sosial akan menghasilkan tata kelola yang lebih baik yang ditandai oleh perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaksanaannya yang lebih tepat sasaran. Peningkatan tata kelola yang menjadi lebih baik dan akuntabel akan menghasilkan layanan publik termasuk layanan dasar yang lebih baik.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Integrasi model atau pendekatan akuntabilitas sosial dalam musdes memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat terutama masyarakat rentan seperti anak, perempuan dan disabilitas ikut memberikan masukan dalam proses perencanaan dan anggaran bahkan terlibat dalam pelaksanaan dan pemantauannya. Musdes yang diperkuat dengan model akuntabilitas sosial dalam pelaksanaannya, akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan negara dalam mengupayakan peningkatan atau perbaikan layanan publik mereka terima terutama layanan dasar

Perencanaan Komitmen <i>(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)</i>			
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
1. Tersedianya kajian akuntabilitas sosial dalam musdes	Dokumen/laporan kajian	31 Maret 2023	Penanggungjawab Utama: Kemendesa & WVI
			Pemangku Kepentingan Pendukung
			K/L OMS Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemendagri WVI & Mitra
2. Dialog/ diskusi publik akuntabilitas sosial dalam Musdes	Dokumentasi masukan/input publik	31 Maret 2023	Penanggungjawab Utama: Kemendesa & WVI
			Pemangku Kepentingan Pendukung
			K/L OMS Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemendagri WVI & Mitra
3 Tersedianya. Petunjuk Teknis (Juknis) akuntabilitas sosial dalam Musdes	Dokumen Juknis yang ditetapkan atau disepakati	31 Desember 2023	Penanggungjawab Utama: Kemendesa & WVI
			Pemangku Kepentingan Pendukung
			K/L OMS Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemendagri WVI & Mitra
4. Terselenggaranya diseminasi & pelatihan petunjuk teknis (juknis) akuntabilitas Sosial dalam musdes	ToT & ToF	31 Maret 2024	Penanggungjawab Utama: Kemendesa & WVI
			Pemangku Kepentingan Pendukung
			K/L OMS Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemendagri WVI & Mitra
	Terlaksana uji coba di Desa pilot	30 Juni 2024	Penanggungjawab Utama: Kemendesa & WVI
			Pemangku Kepentingan Pendukung

5. <i>Uji coba/piloting model akuntabilitas sosial dalam musdes</i>			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemendagri	WVI & Mitra	
6. <i>Replikasi model akuntabilitas sosial dalam musdes</i>		31 Desember 2024	Penanggungjawab Utama:Kemendesa & WVI		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemendagri	WVI & mitra	